



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANWAR USMAN**
2. Jabatan : **KETUA**
3. NHK : **101644**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 5.176.100.000

1. Tanah Seluas 297 m2 di KAB / KOTA BIMA, WARISAN Rp. 141.000.000
2. Tanah Seluas 17000 m2 di KAB / KOTA BIMA, WARISAN Rp. 300.000.000
3. Tanah Seluas 5100 m2 di KAB / KOTA BIMA, WARISAN Rp. 100.000.000
4. Tanah Seluas 2700 m2 di KAB / KOTA BIMA, WARISAN Rp. 81.000.000
5. Bangunan Seluas 144 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
6. Bangunan Seluas 216 m2 di KAB / KOTA KOTA BIMA , HASIL SENDIRI Rp. 765.000.000
7. Bangunan Seluas 216 m2 di KAB / KOTA BIMA, HASIL SENDIRI Rp. 171.000.000
8. Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA BIMA, WARISAN Rp. 41.000.000
9. Tanah Seluas 1800 m2 di KAB / KOTA BIMA, WARISAN Rp. 61.000.000
10. Tanah Seluas 2300 m2 di KAB / KOTA BIMA, WARISAN Rp. 81.000.000
11. Tanah Seluas 800 m2 di KAB / KOTA BIMA, WARISAN Rp. 41.000.000
12. Tanah Seluas 2300 m2 di KAB / KOTA BIMA, WARISAN Rp.



- 81.000.000
13. Tanah Seluas 1200 m2 di KAB / KOTA BIMA, WARISAN Rp.
51.000.000
14. Tanah Seluas 3300 m2 di KAB / KOTA BIMA, WARISAN Rp.
76.000.000
15. Tanah Seluas 580 m2 di KAB / KOTA BIMA, WARISAN Rp.
26.000.000
16. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA BIMA, WARISAN Rp.
26.000.000
17. Tanah Seluas 5967 m2 di KAB / KOTA BIMA, WARISAN Rp.
71.000.000
18. Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA BIMA, HASIL SENDIRI Rp.
51.000.000
19. Tanah dan Bangunan Seluas 223 m2/223 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
20. Tanah Seluas 2899 m2 di KAB / KOTA BIMA, HASIL SENDIRI Rp.
92.000.000
21. Tanah Seluas 2000 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG
SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
22. Tanah dan Bangunan Seluas 801 m2/126 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000
23. Tanah Seluas 280 m2 di KAB / KOTA LUMAJANG, HASIL SENDIRI
Rp. 8.000.000
24. Tanah Seluas 144 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp.
111.000.000
25. Tanah dan Bangunan Seluas 759 m2/65 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.610.000.000
26. Tanah Seluas 208 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG
SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 376.000.000
27. Tanah Seluas 112 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG
SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 211.000.000
28. Tanah Seluas 8790 m2 di KAB / KOTA BIMA, HASIL SENDIRI Rp.
70.000.000
29. Tanah Seluas 1753 m2 di KAB / KOTA BIMA, HASIL SENDIRI Rp.
41.000.000



30. Tanah Seluas 986 m2 di KAB / KOTA BIMA, HASIL SENDIRI Rp.
7.100.000
31. Tanah Seluas 8959 m2 di KAB / KOTA BIMA, HASIL SENDIRI Rp.
71.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 301.000.000

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp.
80.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI
Rp. 3.000.000
3. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp.
105.000.000
4. MOBIL, TOYOTA KIJANG MINIBUS Tahun 1997, HASIL SENDIRI
Rp. 18.000.000
5. MOBIL, TOYOTA COROLLA ALTIS SEDAN Tahun 2002, HASIL
SENDIRI Rp. 95.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 300.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 123.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 27.592.212.061

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 33.492.312.061

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 33.492.312.061

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.